

## PENGARUH INVESTASI ASING DAN HUTANG LUAR NEGERI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Niken Paramita Purwanto<sup>1</sup>  
Dewi Restu Mangeswuri<sup>2</sup>

### **Abstract**

*Foreign investment and foreign debt are economic indicators that still indebated. It will affect a country's economic growth. This study aims to examine and analyze the influence of foreign debt and foreign investment on economic growth in Indonesia. This study is an analysis of secondary data gathering. The data used are time series data from the year of 1981 until year of 2010. The analysis method is the linear regresion model. Where economics growth was use indicators of Gross Domestic Product (GDP) as the dependent variabel and real foreign debt and foreign investment as independent variabel. Based on the result obtaineda significant difference between economic growth simoultaneoustly with foreign debt, foreign investment. The third level of influence of this variabels for percent, while 57,4 percent, while 42,6 percent are influenced by other factors not eximined in this study. However, debt and foreing investment have sicnificant influence with the probability of 5 percent. Foreign debt variables obtained probability equal to 0,094 with a positive direction, this indicates that foreign debt has significant positive effect on economic growth in Indonesia and foreign investment variables probability equal to 0,003 with a positive direction. This also indicates than foreign investment also has significant positif effect on economic growth in Indonesia.*

*Keywords: Indonesian Economic Growth, Foreign Investment, Foreign Debt.*

### **Abstrak**

Penanaman modal asing dan hutang luar negeri merupakan indikator ekonomi yang sering menjadi pembicaraan akan pengaruhnya terhadap pertumbuhan suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pengaruh hutang luar negeri dan penanaman

---

<sup>1</sup> Penulis adalah kandidat peneliti bidang ekonomi dan kebijakan publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR-RI dengan email: paramita.niken@yahoo.co.id.

<sup>2</sup> Penulis adalah kandidat peneliti bidang ekonomi dan kebijakan publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR-RI dengan email: mangeswuri@yahoo.com.

modal langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian ini merupakan analisis terhadap data sekunder. Data yang digunakan adalah data time series dari tahun 1981 sampai tahun 2010. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear. Di mana pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai indikator Produk Domestik Bruto (PDB) riil sebagai variabel dependen dan hutang luar negeri dan penanaman modal asing sebagai variabel independen. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan hutang luar negeri dan penanaman modal asing. Besarnya pengaruh variabel tersebut sebesar 57,4 persen, sedangkan 42,6 persen lainnya dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Secara lengkap variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan dengan probabilitas 5 persen. Untuk variabel hutang luar negeri diperoleh probabilitas sebesar 0,003 dengan arah positif. Ini menunjukkan bahwa hutang luar negeri memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan probabilitas untuk penanaman modal asing adalah 0,009 dengan arah positif. Ini menunjukkan bahwa penanaman modal asing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Penanaman Modal Asing, Hutang Luar Negeri.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam analisa makro ekonomi tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara diukur dari perkembangan Produk Nasional Bruto riil atau pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi beberapa faktor yang merupakan indikator perekonomian atau disebut juga indikator ekonomi makro<sup>3</sup>. Dari beberapa indikator yang sering menjadi sorotan dalam pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di antaranya adalah penanaman modal asing (PMA) dan investasi portofolio. Dampak hutang luar negeri dalam pertumbuhan ekonomi banyak dipertanyakan orang. Beberapa pengalaman dan bukti empiris juga telah menunjukkan bahwa sejumlah negara memanfaatkan pinjaman luar negeri untuk melaksanakan pembangunannya dapat berhasil dengan baik dalam arti negara tersebut dapat meningkatkan taraf

---

<sup>3</sup> Arif Arryman (1999), "*Momentum untuk Keluar dari Perangkap Utang Luar Negeri*".

perekonomiannya dan sekaligus dapat membayar kembali hutang luar negerinya tetapi tidak sedikit pula negara yang memiliki pengalaman sebaliknya yaitu kondisi perekonomian yang mengalami kemerosotan, sehingga memerlukan bantuan dari donor untuk membayar hutang-hutangnya. Sebagaimana halnya dengan hutang luar negeri, penanaman modal asing dan investasi portofolio merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Penanaman modal asing, baik penanaman modal langsung maupun investasi portofolio, diarahkan untuk menggantikan peranan dari hutang luar negeri sebagai sumber pembiayaan pertumbuhan dan pembangunan perekonomian nasional. Peran penanaman modal asing dirasa semakin penting melihat kenyataan bahwa jumlah hutang luar negeri Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan.

Sebagai negara berkembang pengaruh investasi asing mempunyai arti penting terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penanaman modal asing dipandang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan perekonomian. Modal asing khususnya hutang luar negeri, secara faktual ditempatkan sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan, meskipun secara normatif harus ditempatkan sebagai sumber tambahan. Kenyataan inilah yang menyebabkan bahaya tersembunyi, yang secara inheren melekat pada pola pembangunan yang didorong modal asing. Apabila posisi ketergantungan semakin besar, semakin besar pula risiko terkait yang harus dihadapi oleh sistem ekonomi global dalam bentuk ketergantungan terhadap modal asing, khususnya hutang luar negeri<sup>4</sup>.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia?

---

<sup>4</sup> Didik J. Rochbini (1995) "*Resiko Pembangunan yang Dibimbing Utang*", Gramedia Jakarta.

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis kontribusi penanaman modal asing dan hutang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2. Untuk menganalisis besarnya pengaruh penanaman modal asing dan hutang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

## II. PENDEKATAN TEORI

Studi empiris mengenai pengaruh arus masuk modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara sedang berkembang telah banyak dilakukan. Peran modal asing dalam perekonomian atau pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih diperdebatkan, baik mengenai intensitas maupun arahnya. Menurut Michael F. Todaro<sup>5</sup> terdapat dua kelompok pandangan mengenai modal asing. Pertama, kelompok yang mendukung modal asing, mereka memandang modal asing sebagai pengisi kesenjangan antara persediaan tabungan, devisa, penerimaan Pemerintah, keterampilan manajerial, serta untuk mencapai tingkat pertumbuhan. Kedua, kelompok yang menentang modal asing dengan perusahaan multi nasionalnya, berpendapat bahwa modal asing cenderung menurunkan tingkat tabungan dan investasi domestik.

Dengan menggunakan data tahun 1970-1986, Sritua Arif dan Adi Sasono<sup>6</sup> menemukan bahwa arus bersih modal asing yang masuk ke Indonesia, baik yang berupa investasi modal asing dan hutang luar negeri, setelah memperhitungkan pembayaran cicilan hutang, bunga, dan keuntungan yang ditransfer pihak asing ke luar negeri, menunjukkan nilai kumulatif negatif, bahkan modal asing ini cenderung berdampak mendesak keluar (*crowding out*) terhadap tabungan domestik. Hasil yang serupa juga dikemukakan oleh beberapa penelitian Weiskoft, Chenery, dan Strout, Mudrajat Kuncoro, dan Bambang Kustianto yang menunjukkan bahwa modal asing yang berbentuk hutang berpengaruh negatif terhadap tabungan domestik di berbagai negara berkembang termasuk Indonesia. Di samping

---

<sup>5</sup> Todoro, P. Michael (1998), *'Ekonomi Pembangunan di Dunia Ketiga'*, Bina Aksara, Jakarta.

<sup>6</sup> Sritua Arief dan Adi Sasono (1987) *'Modal Asing, Beban Hutang Luar Negeri dan Ekonomi Indonesia'*, Lembaga Studi Pembangunan dan UI Press, Jakarta.

itu, arus modal asing juga dapat berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, walaupun secara statistik tidak signifikan. Studi-studi tersebut juga menemukan bahwa tabungan domestik lebih penting peranannya daripada modal asing, baik secara kuantitatif maupun statistik dalam menentukan pertumbuhan ekonomi<sup>7</sup>. Berbeda dengan hutang luar negeri, salah satu sumber daya modal asing yaitu penanaman modal asing justru berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi cenderung berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PMA. Artinya bila pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan menarik investor asing untuk menanamkan modalnya yang berupa penanaman modal asing, dengan kata lain nilai penanaman modal asing akan meningkat bila pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga meningkat atau tinggi. Hal ini terjadi karena pada saat periode sebelum krisis moneter para investor memandang bahwa tingkat pertumbuhan bukanlah hal yang pokok untuk menanamkan investasinya tetapi setelah terjadinya krisis ekonomi para investor lebih memperhatikan kestabilan dari pertumbuhan ekonomi untuk lebih menyakinkan bahwa investasi yang dilakukan akan memberikan tingkat keuntungan yang sesuai dengan yang diharapkan. Hanya studi Earl yang menunjukkan bahwa hutang luar negeri meningkatkan tabungan domestik, tapi ini hanya terjadi di negara Amerika Latin.

Analisis *time series* di beberapa negara seperti; Pakistan, Cina, Korea menunjukkan bahwa hutang luar negeri memiliki kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi baik di negara miskin maupun kaya. Di samping itu, Papanek dan Dowling mendukung hipotesis bahwa hutang luar negeri berkontribusi cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi seperti tabungan domestik dan aliran modal masuk swasta, khususnya di beberapa negara Asia. Hasil studi ini sesuai dengan penelitian Rana-Dowling untuk negara berkembang selama tahun 1965-1982 dengan menggunakan persamaan simultan. Mereka menyimpulkan bahwa arus modal asing memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi langsung asing memberi kontribusi terhadap pertumbuhan baik melalui pembentukan

---

<sup>7</sup> Dani Sugiri. 2009. Pengaruh Hutang Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi (<http://danisugiri.wordpress.com/20/09/06/20/pengaruh-utangpemerintah-terhadap-pertumbuhanekonomi>, diakses 16 Oktober 2011).

kapital maupun peningkatan efisiensi investasi, dan hutang luar negeri memberi kontribusi lebih besar daripada arus modal asing<sup>8</sup>.

Investasi, khususnya investasi asing sampai hari ini merupakan faktor penting untuk menggerakkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Harapan masuknya investasi asing dalam kenyataannya masih sulit untuk diwujudkan. Faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain: Pertama faktor Sumber Daya Alam, Kedua faktor Sumber Daya Manusia, Ketiga faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha, Keempat faktor kebijakan Pemerintah, Kelima faktor kemudahan dalam perizinan.

Salah satu cara untuk membangkitkan atau menggerakkan kembali perekonomian nasional seperti sedia kala sebelum terjadinya krisis ekonomi adalah kebijakan mengundang masuknya investasi di Indonesia. Investasi, khususnya investasi asing sampai hari ini merupakan faktor penting untuk menggerakkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Harapan masuknya investasi asing dalam kenyataannya masih sulit untuk diwujudkan. Banyak faktor yang menyebabkan timbulnya keengganan masuk investasi ke Indonesia pada saat ini. Faktor-faktor yang dapat menjadi pendukung masuknya arus investasi ke suatu negara, seperti jaminan keamanan, stabilitas politik, dan kepastian hukum, tampaknya menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi Indonesia. Bahkan otonomi daerah yang sekarang diterapkan di Indonesia dianggap menjadi permasalahan baru dalam kegiatan investasi di beberapa daerah. Dengan mulai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Indonesia memasuki era baru dalam hubungan antar Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah. Indonesia memasuki era otonomi daerah. Keadaan baru sangat diperhitungkan oleh para investor berkaitan dengan dampak negatif yang ditimbulkan. Masuknya perusahaan asing dalam kegiatan investasi di Indonesia dimaksudkan sebagai pelengkap untuk mengisi sektor-sektor usaha dan industri yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak swasta nasional, baik karena alasan teknologi, manajemen, maupun alasan

---

<sup>8</sup> Pradumo, B. Rana and J. Malcolm Dowling (1988). "The Impact of Foreign Capital and Growth: Evidences From Asian Developing Countries". The Developing Economies, Vol. XXVI, No. 1, Maret 1988.

permodalan. Modal asing juga diharapkan secara langsung maupun tidak langsung dapat lebih merangsang dan menggairahkan iklim atau kehidupan dunia usaha, serta dapat dimanfaatkan sebagai upaya menembus jaringan pemasaran internasional melalui jaringan yang mereka miliki. Selanjutnya modal asing diharapkan secara langsung dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi Indonesia

Dalam literatur ekonomi, investasi asing dapat dilakukan dalam bentuk investasi portofolio dan investasi langsung atau *foreign direct investment* (FDI). Investasi portofolio dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. Sedangkan investasi langsung yang dikenal dengan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Penanaman modal asing dan dalam negeri di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Dibandingkan dengan investasi portofolio, Penanaman Modal Asing (PMA) lebih banyak mempunyai kelebihan di antaranya sifatnya yang permanen (jangka panjang), memberikan andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, membuka lapangan kerja baru, di mana lapangan kerja ini sangat penting bagi negara mengingat terbatasnya kemampuan Pemerintah untuk penyediaan kesempatan kerja. Sedangkan, dalam investasi portofolio, dana yang masuk ke perusahaan yang menerbitkan surat berharga (*emiten*), dan belum tentu membuka lapangan kerja baru. Sekalipun ada emiten yang telah mendapatkan dana dari pasar modal untuk memperluas usahanya atau membuka usaha baru belum berarti membuka lapangan kerja. Tidak sedikit pula dana yang masuk ke emiten hanya untuk memperkuat struktur modal atau mungkin malahan untuk membayar hutang bank.

Penanaman modal asing terhadap pembangunan bagi negara berkembang dapat diperinci menjadi lima (5). *Pertama*, sumber dana eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan oleh negara sedang berkembang sebagai dasar untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti

dengan perpindahan struktur produksi dan perdagangan. *Ketiga*, modal asing dapat berperan penting dalam memobilisasi dana maupun transformasi struktural. *Keempat*, kebutuhan akan modal asing menjadi menurun segera setelah perubahan struktural benar-benar terjadi meskipun modal asing di masa selanjutnya lebih produktif. *Kelima*, bagi negara-negara sedang berkembang yang tidak mampu memulai membangun industri-industri berat dan industri strategis, adanya modal asing akan sangat membantu untuk dapat mendirikan pabrik-pabrik baja, alat-alat mesin, pabrik elektronik, industri kimia dasar, dan sebagainya. Selama ini, investor domestik di negara berkembang yang enggan melakukan usaha yang berisiko tinggi seperti eksploitasi sumber-sumber daya alam yang belum dimanfaatkan dan membuka lahan-lahan baru, maka hadirnya investor asing akan sangat mendukung merintis usaha di bidang-bidang tersebut. Adanya pengadaan prasarana negara, pendirian industri-industri baru, pemanfaatan sumber-sumber baru, pembukaan daerah-daerah baru, akan membuka berkecenderungan baru yaitu meningkatkan lapangan kerja. Di mana tekanan pendudukan pada tanah pertanian berkurang dan pengangguran dapat diatasi. Inilah keuntungan sosial yang diperoleh adanya kehadiran investor asing. Adanya transfer teknologi mengakibatkan tenaga kerja setempat menjadi terampil sehingga akan meningkatkan marginal produktifitasnya yang pada gilirannya akan meningkatkan keseluruhan upah riil. Semua ini menunjukkan bahwa modal asing cenderung menaikkan tingkat produktifitas, kinerja dan pendapatan nasional. Dengan demikian, kehadiran PMA bagi negara sedang berkembang sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Modal asing membantu dalam industrialisasi, pembangunan modal dan menciptakan kesempatan kerja, serta keterampilan teknik. Melalui modal asing terbuka daerah-daerah dan tergarap sumber-sumber baru. Risiko dan kerugian pada tahap perintisan juga tertanggung, selanjutnya modal asing mendorong pengusaha setempat untuk bekerja sama. Modal asing juga membantu mengurangi problem neraca pembayaran dan tingkat inflasi, sehingga akan memperkuat sektor usaha negara dan swasta domestik negara tuan rumah. Penanaman modal asing di Indonesia tidak terlepas dari cita-cita hukum ekonomi Indonesia yaitu menggagas dan menyiapkan konsep hukum tentang kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi yang diharapkan adalah kehidupan ekonomi berbangsa dan bernegara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan dalam keadilan sosial, sebagaimana yang dicita-citakan Pancasila. Dan Indonesia sebagai negara berdaulat sekaligus

sebagai negara berkembang mempunyai pola tertentu terhadap konsep hukum dalam kegiatan ekonomi, meliputi konsep pencapaian masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, konsep ekonomi kekeluargaan yang Pancasilais, konsep ekonomi kerakyatan untuk membela kepentingan rakyat.

Oleh karena itu, peranan PMA di Indonesia cukup mendukung juga perkembangan kehidupan ekonomi sesuai dengan konsep hukum dalam kegiatan ekonomi dan cita-cita hukum ekonomi Indonesia. Dan untuk mendukung investasi di Indonesia maka perlu pembentukan hukum ekonomi dengan perangkat peraturan membutuhkan kajian yang bersifat komprehensif dan pendekatan secara makro dengan informasi yang akurat demi multidisipliner dari berbagai aspek, antara lain:

- a. Ekonomi dan sosial
- b. Sosiologis dan budaya
- c. Kebutuhan-kebutuhan dasar dan pembangunan
- d. Praktis dan operasional serta kebutuhan ke depan
- e. Moral dan etika bisnis yang berlaku dalam konsep kelayakan serta kepatutan dalam kehidupan manusia dan kemanusiaan yang beradab.

Secara teoritis, terdapat beberapa teori yang mencoba menjelaskan mengapa para investor dari negara maju ke negara berkembang terjadi *The Product Cycle Theory* dan *The Industrial Organization Theory of Vertical Organization*. *The Product Cycle Theory* yang dikembangkan oleh Raymond Vernon<sup>9</sup> ini menyatakan bahwa setiap teknologi atau produk berevolusi melalui tiga fase: Pertama fase permulaan atau inovasi, kedua fase perkembangan proses, dan ketiga fase standarisasi. Dalam setiap fase tersebut sebagai tipe perekonomian negara memiliki keuntungan komparatif (*Comparative advantage*). *The Industrial Organization Theory of Vertical Integration* merupakan teori yang paling tepat untuk diterapkan pada *new multinasionalism* dan pada investasi yang terintegrasi secara vertikal. Pendekatan teori ini berawal dari penambahan biaya-biaya untuk melakukan bisnis diluar negeri (dengan investasi) harus mencakup biaya-biaya lain yang harus dipikul lebih banyak daripada biaya yang diperuntukkan hanya untuk sekedar mengekspor dari pabrik-pabrik dalam negeri. Oleh karena itu perusahaan itu harus memiliki beberapa kompensasi

---

<sup>9</sup> Raymon Vernon (1991) "*Managing in the International Economy*". Practice Hall New York.

atau keunggulan spesifik bagi perusahaan seperti keahlian teknis manajerial keadaan ekonomi yang memungkinkan adanya monopoli. Menurut teori ini, investasi dilakukan dengan cara integrasi secara vertikal yakni dengan penempatan beberapa tahapan produksi di beberapa lokasi yang berbeda-beda di seluruh dunia. Motivasi utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah, manfaat pajak lokal dan lain-lain. Di samping itu motivasi yang lain adalah untuk membuat rintangan perdagangan bagi perusahaan-perusahaan lain, artinya dengan investasinya di luar negeri ini berarti perusahaan-perusahaan multinasional tersebut telah merintangai persaingan-persaingan dari negara lain sehingga monopoli dapat dipertahankan. Motif utama modal internasional baik yang bersifat investasi modal asing langsung (PMA) maupun investasi portofolio adalah untuk mendapatkan *return* yang lebih tinggi daripada di negara sendiri melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sistem perpajakan yang lebih menguntungkan dan infrastruktur yang lebih baik.

Untuk menarik arus modal yang signifikan ke suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor: iklim investasi yang kondusif dan prospek pengembangan di negara penerima modal. Dilihat dari kedua faktor di atas, maka tampaknya arus modal asing justru lebih banyak mengalir ke negara-negara maju daripada ke negara-negara berkembang. Aliran modal ke negara-negara berkembang masih dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

1. Tingkat perkembangan ekonomi negara penerima modal
2. Stabilitas politik yang memadai
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan investor
4. Aliran modal cenderung mengalir ke negara-negara dengan tingkat pendapatan per kapita yang tinggi.

Adanya keengganan masuknya investasi asing dan adanya indikasi relokasi investasi ke negara lain disebabkan tidak kondusifnya iklim investasi di Indonesia dewasa ini. Menurut Rahmadi Supanca, berbagai faktor yang dituding menjadi penyebab dari terjadinya tidak kondusifnya iklim investasi yaitu:

1. Instabilitas politik dan keamanan
2. Banyaknya kasus demonstrasi/pemogokkan di bidang ketenagakerjaan

3. Pemahaman yang keliru terhadap pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah serta belum lengkap dan jelasnya pedoman menyangkut tata cara pelaksanaan otonomi daerah
4. Kurangnya jaminan kepastian hukum
5. Lemahnya penegakkan hukum
6. Kurangnya jaminan/perlindungan Investasi
7. Dicabutnya berbagai insentif di bidang perpajakan
8. Masih maraknya praktek KKN
9. Citra buruk Indonesia sebagai negara yang bangkrut, diambang disintegrasi dan tidak berjalannya hukum secara efektif makin memerosotkan daya saing Indonesia dalam menarik investor untuk melakukan kegiatannya di Indonesia
10. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia.

Selain faktor *disadvantage* di atas, iklim investasi di Indonesia bertambah tidak kondusif lagi karena stabilitas politik dan sosial serta jaminan keamanan dan penegakkan hukum di dalam negeri yang masih rawan. Masalah yang paling sering dikeluhkan oleh investor adalah masalah penegakkan hukum. Hasil *survey* dari *Political and Economic Risk Consultancy Ltd* menunjukkan bahwa Indonesia paling buruk dalam skor hukum di Asia. Indonesia pada posisi paling atas dengan tidak adanya kepastian hukum membuat para investor merasa tidak nyaman untuk menanamkan uangnya di Indonesia. Hal ini yang juga sering dikeluhkan oleh banyak investor adalah masalah perizinan dan birokrasi yang masih dianggap bertele-tele dan memakan biaya yang besar. Namun hal tersebut mulai mengalami perbaikan dan peningkatan sejak dikelarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Faktor kelembagaan yang menjadi daya tarik investasi di daerah. Kelembagaan ini menyangkut pelayanan, kebijakan Pemerintah Daerah dan kepastian hukum. Kesimpulan ini merupakan hasil rating yang dilakukan KPPOD pada tahun 2002 untuk mengetahui daya tarik investasi kabupaten atau kota. Peraturan yang tumpang tindih, panjangnya rantai birokrasi, pungutan liar, merupakan beban yang besar bagi pengusaha. Dari segi peraturan yang diterbitkan Pemerintah Daerah tak jarang tumpang tindih dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintahan di atasnya. Karena itu suatu daerah yang potensi alamnya sangat melimpah sangat mungkin tidak menarik bagi pelaku usaha atau bagi investor karena adanya berbagai

kebijakan tumpang tindih tersebut. Oleh karena itu faktor daya tarik bagi investor datang dari potensi ekonomi suatu daerah, namun faktor kelembagaan juga harus dibenahi. Potensi sumber daya alam di berbagai daerah di Indonesia yang tersedia masih memerlukan pemodal untuk pengelolaannya, oleh karenanya upaya yang dilakukan adalah menarik banyak investor agar berminat menanamkan modalnya dan perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pada pelaksanaan penanaman modal di daerah, seringkali timbul kendala-kendala yang dikeluhkan oleh para investor, yaitu tidak efisiennya pengurusan perizinan usaha. Investor seringkali dibebani oleh urusan birokrasi yang berbelit-belit sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan disertai dengan biaya tambahan yang cukup besar, oleh sebab itu Pemerintah pada akhirnya perlu untuk mengeluarkan Keppres mengingat cukup banyaknya kendala yang dihadapi oleh para investor yang berkaitan dengan proses pengurusan izin usaha atas kegiatan investasi yang dilakukan di daerah. Masalah ini timbul setelah berlakunya kebijakan otonomi daerah, di mana Pemerintah Daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota diberikan kewenangan dalam bidang penanaman modal. Sebelum pelaksanaan otonomi daerah, pengurusan izin usaha bagi para investor dilakukan oleh Pemerintah Pusat (BPKM) dan Pemerintah provinsi (BKPM). Keberadaan Keppres Nomor 29 Tahun 2004 tersebut bertujuan untuk menjamin investor dalam melakukan investasi di Indonesia dan juga menerapkan sistem pelayanan satu atap yang diharapkan dapat mengakomodasi keinginan dunia usaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih efisien, mudah, cepat, dan tepat sehingga diharapkan dapat menarik dan mempercepat masuknya investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah telah menimbulkan efek negatif bagi kegiatan usaha dan penanaman modal. Banyak investor asing yang mengeluh karena banyak pungutan liar yang tidak jelas landasan hukumnya. Berbagai peraturan daerah yang tumpang tindih dengan peraturan pusat sehingga membebani dunia usaha, di samping praktek korupsi yang hampir merata di seluruh daerah. Dengan sistem perpajakan yang baru, Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat menggunakan instrumen pajak untuk meningkatkan daya tarik investor dan pekerja-pekerja produktif. Jika daerah mengenakan tarif pajak terlalu tinggi, sumber daya manusia dan investor yang ada cenderung hengkang mencari lokasi yang tarif pajaknya lebih rendah. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi tertentu tetapi belum tereksploitasi dengan baik akan cenderung

memberikan intensif perpajakan dan kemudahan-kemudahan untuk menarik arus investasi dan sumber daya manusia produktif. Pemberlakuan otonomi daerah telah menimbulkan adanya kecenderungan Pemerintah Daerah untuk menguasai aset-aset dan sumber daya yang ada di daerahnya dengan alasan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akibatnya pengeluaran peraturan-peraturan daerah seringkali menjadi tumpang tindih, sehingga menimbulkan permasalahan baru bagi dunia usaha khususnya investor yang akan melakukan usahanya di daerah. Hal ini berarti dengan berlakunya otonomi daerah, Pemerintah telah dianggap menghambat investasi karena masih banyaknya biaya tambahan dan berbagai pungutan atau retribusi daerah. Masih ada perebutan kewenangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal pemberian izin penanaman modal. Investor masih enggan berhubungan dengan Pemerintah Daerah.

Sementara itu, negara berkembang mempunyai perspektif bahwa investasi merupakan masalah perdagangan semata. Keputusan mengenai investasi mencakup masalah makro ekonomi, stabilitas sosial, maupun pembangunan regional. Dengan demikian sulit diterima bahwa sebuah kebijakan yang menyangkut masalah yang cukup luas disubordinasikan ke dalam masalah perdagangan. Bagi negara berkembang perundingan di bidang investasi, berarti sama dengan melayani tuntutan dan kehendak Negara maju. Hal tersebut menunjukkan bahwa investor asing menginginkan adanya kewajiban timbal balik antar negara penanam investasi dengan negara penerima investasi, adanya pengaturan standar sehingga aktivitas perusahaan menjadi kondusif, adanya sikap saling menghargai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dan adanya keharmonisan kebijakan di bidang pajak dan insentif lainnya antara negara penerima investasi.

Secara garis besar, terdapat tiga sumber utama modal asing dalam suatu negara yang menganut sistem perekonomian terbuka, yaitu pinjaman luar negeri (*debt*), Penanaman Modal Asing langsung (*Foreign Direct Investment=FDI*), dan investasi portofolio. Pinjaman luar negeri dilakukan oleh Pemerintah secara bilateral maupun multilateral, FDI merupakan investasi yang dilakukan swasta asing ke suatu negara. Bentuknya dapat berupa cabang perusahaan multinasional, anak perusahaan multinasional, lisensi, *Joint Ventura*, sedangkan investasi portofolio merupakan investasi yang dilakukan melalui pasar modal. Manfaat yang dapat diharapkan dari suatu paket modal asing (FDI) berupa penyerapan tenaga kerja; alih

teknologi; pelatihan manajerial dan akses ke pasar Internasional melalui ekspor. Jenis investasi dibedakan atas investasi langsung (*direct investment*) dan investasi portofolio (*portofolio investment*). Investasi luar negeri langsung biasanya dianggap bentuk lain dari pemindahan modal yang dilakukan oleh perusahaan orang-orang dalam suatu negara dalam aktifitas ekonomi negara lain yang melibatkan beberapa bentuk partisipasi modal di bidang usaha yang mereka investasikan. Investasi langsung berarti perusahaan dari negara penanam modal secara de facto dan de jure melakukan pengawasan atas *asset* (aktiva) yang ditanam di negara penyimpan modal dengan cara investasi. Menurut Nindyo Pramono bahwa investasi langsung investor mengendalikan manajemen, biasanya dilakukan oleh perusahaan trans-nasional dan periode waktunya panjang karena menyangkut barang-barang. Modal investasi langsung lebih tertarik pada besar dan tingkat pertumbuhan pasar, tenaga kerja dan biaya produksi serta infrastruktur. Sedangkan pada investasi portofolio, investor hanya menyediakan modal keuangan dan tidak terlibat dalam manajemen. Investornya adalah investor institusional, bersifat jangka pendek dan mudah dilikuidasi dengan cara menjual saham yang dibeli.

Dari beberapa pandangan dan pengertian di atas terlihat bahwa investasi langsung adalah adanya keterlibatan langsung pihak investor terhadap investasi yang dilakukannya, baik dalam permodalan, pengokohan, dan pengawasan. Menurut Sidik Jatmika kebaikan dari investasi langsung adalah tidak mendatangkan beban yang harus dibayar dalam bentuk bunga, deviden dan/atau pembayaran kembali, dapat mengkombinasikan keahlian, teknologi dan modal, dapat mengatasi masalah transfer uang, adanya penanaman kembali dari keuntungan investasi yang belum ada dan dapat menciptakan alih teknologi dan keterampilan.

Mengikuti kerangka pemikiran dari model Harrod – Domar di dalam suatu ekonomi tertutup (tanpa sektor luar negeri) dalam kondisi *full employment*, dan tanpa mobilitas kapital, tabungan menjadi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, yang mekanismenya lewat pertumbuhan investasi (*saving-investment link*). Oleh karena itu investasi dapat dikatakan sebagai fungsi dari tabungan  $I = f(S)$ . Semakin tinggi tingkat tabungan yang dapat diciptakan, semakin besar kemampuan negara untuk melakukan investasi. Selanjutnya, peningkatan investasi menambah lebih banyak lagi kapital dan lewat proses multiplier menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Dengan

rasio  $S/Y$  tetap tidak berubah, peningkatan pendapatan menambah kemampuan masyarakat untuk menabung, dan seterusnya.

Suatu ekonomi yang terbuka, peningkatan tabungan domestik tidak harus membuat investasi juga meningkat, atau dalam perkataan lain tabungan domestik tidak langsung ditransfer ke investasi. Dengan mobilitas kapital yang tinggi (tidak ada hambatan terhadap arus modal masuk dan keluar), tabungan dan investasi masing-masing berdiri sendiri, tidak saling mempengaruhi. Meskipun dengan tabungan tetap, investasi domestik dapat meningkat karena adanya modal masuk dari luar negeri.

Namun studi-studi empiris yang ada menunjukkan adanya hubungan yang positif antara tabungan dan investasi. Hal ini didasarkan kepada beberapa alasan. Pertama, peningkatan produktivitas dan *shocks* lainnya memberikan efek yang sama terhadap tabungan dan investasi yang diinginkan, sekalipun dalam kondisi di mana mobilitas kapital antar negara sempurna. Kedua, peningkatan tabungan domestik akan membuat investasi meningkat, terutama di negara besar. Ketiga, *capital control* melindungi sumber pajak domestik dan neraca pembayaran luar negeri (*Balance Of Payment* = BOP) sehingga mengurangi kemungkinan defisit BOP. Terakhir, biaya transaksi yang tinggi untuk membeli sekuritas dan investasi di luar negeri, risiko perubahan nilai tukar, dan kebatasan informasi antar negara mengenai investasi membuat tabungan domestik tidak begitu saja lari ke luar negeri untuk maksud investasi.

Hubungan antara pertumbuhan GDP dan tingkat tabungan tidak hanya positif tetapi juga signifikan. Dengan kemajuan teknologi dan akumulasi SDM (*human capital*) pertumbuhan tabungan lewat efek investasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara permanen. Menurut Baldwin dan Meier, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan:

1. *Indogenous factor* (adanya kekuatan dari dalam) untuk berkembang. Masyarakat tersebut berkehendak untuk menaikkan tingkat hidupnya, faktor eksternal hanya bersifat pelengkap bagi keinginan masyarakat untuk berkembang.
2. Mobilitas faktor produksi. Ketidaksempurnaan pasar akan sangat membatasi pergerakan faktor-faktor produksi dari penggunaan yang produktif ke penggunaan yang lebih produktif. Untuk itu perlu dihilangkan ketidaksempurnaan pasar.

3. Akumulasi kapital. Dalam perkembangan ekonomi diperlukan pembentukan kapital riil. Untuk mengukur banyaknya kapital yang dibutuhkan bagi perkembangan ekonomi perlu diperhatikan, tingkat pertumbuhan penduduk, target kenaikan pendapatan riil per kapita, ICOR, dan lain sebagainya.

Untuk meningkatkan sumber dana investasi, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

- a. Menaikkan tingkat tabungan dengan cara mengurangi tingkat konsumsi, misalnya dengan menaikkan pajak.
- b. Pemerintah menjual obligasi negara.
- c. Membatasi impor barang-barang konsumsi, bahkan impor barang-barang modal yang belum begitu diperlukan.
- d. Menjaga inflasi pada tingkat yang wajar, terutama dalam mengurangi tingkat konsumsi riil.
- e. Memindahkan pengangguran tersembunyi (*disguished unemployment*) dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa.
- f. Mengadakan pinjaman luar negeri.
- g. Mendorong ekspor dengan cara memperbaiki nilai tukar (*term of trade*).
- h. Kriteria atau arah investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Kriteria umum investasi adalah mengenai produktivitas untuk perkembangan lebih lanjut, yaitu produktivitas sosial marjinal yang tinggi.
- i. Investasi harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga memaksimalkan perbandingan antara output dan *capital* (COR terendah).
- j. Proyek-proyek yang dipilih harus memberikan perbandingan yang memaksimalkan penggunaan tenaga kerja terhadap investasi (produktivitas tenaga kerja yang tinggi).
- k. Investasi hendaknya mengurangi kesulitan-kesulitan neraca pembayaran luar negeri (BOP) antara ekspor dan investasi.
- l. Penyerapan kapital. Kemampuan penyerapan kapital ditentukan oleh dua hal, yaitu (1) adanya atau tersedianya faktor-faktor produksi komplementer yang bekerja sama dengan capital, dan (2) syarat-syarat yang diperlukan untuk menghindari inflasi dan untuk mempertahankan neraca pembayaran.
- m. Stabilitas dan nilai serta lembaga-lembaga yang ada. Pola investasi merupakan hasil-hasil pertimbangan politis, kebudayaan, agama, nilai dan lainnya. Jadi, lembaga-lembaga non ekonomi untuk pembangunan

sama pentingnya dengan syarat-syarat ekonomis. Pembangunan ekonomi dapat melaju cepat bila diciptakan kebutuhan-kebutuhan baru, motif-motif baru, metode produksi baru, demikian pula lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat. Apabila ada halangan nonekonomis mengenai pembangunan tersebut, sebaiknya diadakan penyesuaian dengan tingkat pembangunannya. Dewasa ini, persaingan ekonomi semakin ketat. Perkembangan perekonomian ditekankan pada optimasi kemampuan daya pikir manusia dan teknologi yang dijadikan senjata pokoknya.

Jumlah tabungan yang tersedia di suatu negara secara sederhana adalah jumlah tabungan domestik dan tabungan asing/luar negeri. Tabungan domestik dibagi menjadi 2 komponen yaitu tabungan Pemerintah dan tabungan swasta/masyarakat. Tabungan Pemerintah terutama sekali terdiri dari tabungan anggaran yang didapat dari kelebihan penerimaan Pemerintah atas konsumsinya, di mana konsumsi Pemerintah didefinisikan sebagai semua pengeluaran Pemerintah dalam bentuk uang ditambah semua aliran modal keluar. Tabungan Pemerintah bisa positif walaupun anggaran Pemerintah secara keseluruhan defisit karena adanya anggaran pengeluaran tersebut termasuk aliran modal keluar yang menggambarkan penggunaan tabungan Pemerintah. Kebijakan-kebijakan Pemerintah mempunyai dampak yang penting terhadap kemampuan memperbaiki tabungan domestik. Pemerintah secara aktif berusaha untuk menerapkan kebijakan-kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong pertumbuhan tabungan dengan menggunakan instrumen-instrumen yang cocok untuk mencapai tujuan tersebut. Tampaknya kebijakan fiskal dan moneter dari Pemerintah tampaknya dirancang memang tanpa memperhatikan implikasinya terhadap tabungan domestik. Pada umumnya tabungan akan memberikan respon yang positif terhadap negara-negara berkembang dan stagnansi atau bahkan menurun pada negara sedang berkembang dan miskin.

Sumber tabungan yang diandalkan oleh masing-masing negara berbeda, tidak hanya tergantung pada faktor-faktor seperti tingkat pendapatan per kapita, kekayaan sumberdaya alam dan komposisi sektoral GDP, tetapi juga tergantung pada sifat dari kebijakan-kebijakan mobilisasi tabungan yang dianut oleh masing-masing negara tersebut. Tabungan Pemerintah hampir seluruhnya berasal dari kelebihan-kelebihan penerimaan

pajak secara keseluruhan atas pengeluaran konsumsi Pemerintah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hanya sedikit sekali kasus di mana tabungan Pemerintah dari badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap tabungan Pemerintah secara keseluruhan. Salah satu prinsip dasar strategi pembangunan adalah bahwa ekspansi investasi yang dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi tidak akan berhasil tanpa adanya usaha untuk meningkatkan pangsa tabungan Pemerintah dalam GDP. Pada umumnya tabungan swasta dikendalikan oleh faktor-faktor seperti rendahnya pendapatan per kapita dan tingginya hasrat konsumsi swasta yang memiliki kapasitas menabung paling besar.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan dalam studi ini merupakan data sekunder berbentuk data *time series* tahunan dari tahun 1981 sampai dengan 2010. Data yang dipergunakan meliputi data pertumbuhan ekonomi (GDB), hutang luar negeri (AID), tabungan domestik (s) serta data investasi asing (PMA) dari *World Bank Data*.

Model dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan oleh Papanek.<sup>10</sup>

$$GDP = f (FDI, AID, S)$$

Keterangan:

- GDP = Produk domestik bruto;
- FDI = Penanaman modal asing;
- AID = Hutang luar negeri;
- S = Tabungan domestik.

Metode Estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda *Ordinary Least Square* (OLS), dengan spesifikasi model sebagai berikut:

$$GDP_t = a_0 + a_1 FDI_t + a_2 AID_t + a_3 S_t + e_t$$

---

<sup>10</sup> Mudrajat Kuncoro (1994) "Dilema Utang Luar Negeri Indonesia", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol. 4, No. 1, Oktober 1994, Yogyakarta.

Konsep penting dalam OLS adalah asumsi stasionaritas di mana semua variabelnya harus bersifat *non stochastik*. Asumsi ini mempunyai konsekuensi yang tidak akan berubah terlalu besar seiring dengan periode waktu pengambilan sampel dan mempunyai kecenderungan mengarah pada nilai rata-rata (*mean*) sehingga pengabaian terhadap asumsi stasionaritas dapat menyebabkan munculnya regresi lancung (*spurious regresion*) yang ditandai dengan nilai  $R^2$  yang tinggi tetapi nilai Durbin Watsonnya rendah. Untuk menghindari gejala *spurious regression* maka dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian kointegrasi. Uji kointegrasi merupakan uji terhadap model analisis terhadap persoalan regresi lancung. Jadi sebelum menggunakan model, harus diyakini bahwa data runtun waktu yang digunakan mempunyai derajat atau orde integrasi yang sama.

Pengujian kointegrasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *Cointegration Regression Durbin Watson* (CRDW) dan metode Dickey-Fuller (1981: 1057-1072) Setelah melakukan regresi terhadap model dasar, maka dapat diketahui nilai Durbin Watson Statistiknya. Angka DW inilah yang digunakan untuk menentukan sifat kointegratif model yang bersangkutan. Apabila model analisis tidak stasioner, maka angka statistik DW-nya akan mendekati nol, dan menolak hipotesis nol non-kointegrasi. Sebaliknya, apabila angka statistik DW-nya besar, maka akan menerima hipotesis alternatif berupa sifat kointegratif ditemukan pada model analisis. Uji CRDW ini merupakan model uji yang menggunakan order satu. Regresi linear berganda dipakai dalam analisis ini karena mempunyai keunggulan dalam mengetahui secara statistik variabel-variabel apa yang berpengaruh terhadap variabel dependen yang telah diterapkan.

Metode Dickey-Fuller (DF) bekerja pada *order* yang lebih tinggi daripada CRDW, model ujinya dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$D(\text{RES}_t) = c - a\text{RES}_{t-1} + a_1D(\text{RES}_{t-1}) + \dots + a_nD(\text{RES}_{t-n}) + e_t$$

Hipotesis nol dan dasar pengambilan keputusan lainnya yang digunakan dalam uji ini di dasarkan pada statistik McKinnon sebagai pengganti uji-t.

Hasil estimasi persamaan linier dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.** Hasil Regresi Linear

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t-hitung	Signifikansi
	B	Standard Error	Beta		
Konstanta	7,300	5,027		1,743	0,094
DEBT	0,655	0,203	0,533	2,886	0,003
FDI	1,542	0,544	1,070	2,795	0,009
Saving	0,366	0,165	0,171	2,924	0,007

Sumber: diolah

Untuk hasil analisis regresi diperoleh bahwa variabel hutang luar negeri (AID), penanaman modal asing (FDI), dan tabungan domestik (S) mempunyai hubungan yang signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi pada tingkat 5 persen.

Koefisien hasil estimasi variabel hutang luar negeri dan penanaman modal asing memberikan tanda positif, yang berarti variabel hutang luar negeri dan penanaman modal asing berpengaruh positif terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Sedangkan hasil estimasi variabel tabungan domestik memberikan tanda positif, yang berarti mengindikasikan hubungan positif antara variabel tabungan domestik dengan pertumbuhan ekonomi.

Hutang luar negeri memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, bila hutang luar negeri meningkat maka akan mendorong PDB yang semakin tinggi. Hasil penelitian ini juga tidak berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa hutang luar negeri memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Begitu pula dengan FDI yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDB. Bila PDB makin besar maka akan mendorong terciptanya FDI. Salah satu motif investor atau perusahaan multinasional untuk melakukan investasi adalah untuk mendapatkan *return* yang tinggi di suatu negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Nilai koefisien regresi hutang luar negeri sebesar 0,655 mengindikasikan bila ada kenaikan hutang luar negeri sebesar 1 persen dengan asumsi variabel lainnya tetap maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami perubahan relatif sebesar 0,655 persen. Ini menunjukkan bahwa hutang luar negeri memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sedangkan koefisien regresi penanaman modal asing memiliki koefisien sebesar 1,542 mengindikasikan apabila ada kenaikan FDI sebesar 1 persen, maka akan menyebabkan adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,541 persen. Ini menunjukkan bahwa penanaman modal asing memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian nilai koefisien variabel tabungan domestik sebesar 0,366 mengindikasikan apabila ada kenaikan tabungan domestik sebesar 1 persen akan menyebabkan kenaikan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,366. Ini menunjukkan bahwa tabungan domestik memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Uji F menunjukkan bahwa nilai F-hitung (6,115) lebih besar dari F-tabel adalah 3,29, yang berarti secara serempak variabel hutang luar negeri, penanaman modal asing, dan tabungan domestik signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Koefisien determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*) digunakan untuk melihat berapa persen dari variasi variabel dependen (Pertumbuhan Ekonomi) dijelaskan oleh variasi dari variabel independen (hutang luar negeri, penanaman modal asing dan tabungan domestik). Nilai koefisien determinasi sebesar 0,574 berarti variabel nilai hutang luar negeri, penanaman modal asing dan tabungan domestik dalam menjelaskan variasi variabel pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 57,4 persen dan sisanya 42,6 persen dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* yang besar akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dengan jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) yang hampir mencapai USD550 miliar di tahun 2009, Indonesia adalah perekonomian dengan laju pertumbuhan tercepat nomor tiga di Asia dan perekonomian terbesar di seluruh Asia Tenggara. Sebagai negara yang tidak terkena dampak krisis keuangan global separah negara tetangganya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 4,5 persen di tahun 2009, dan 5,6 persen di tahun 2010. Angka ini diperkirakan akan meningkat hingga 6 persen di tahun 2011, sehingga Indonesia seringkali disandingkan dengan negara-negara BRIC (Brazil, Rusia, India, dan Cina). Menurut laporan Standard Chartered, pertumbuhan perekonomian Indonesia di masa depan diharapkan lebih

inklusif, mengingat PDB nominal per kapita diperkirakan menjadi berlipat empat di tahun 2020. Sebagian besar keberhasilan ekonomi Indonesia adalah berkat pengelolaan fiskal atau keuangan negara yang baik, pada Januari 2010, lembaga pemeringkatan *Fitch Ratings* telah meningkatkan peringkat kredit Indonesia menjadi BB+ dengan prospek ke depan yang stabil. Peningkatan peringkat kredit ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat dan berkelanjutan, serta posisi fiskal yang semakin membaik. Hal ini menunjukkan peningkatan kepercayaan untuk berinvestasi di Indonesia, karena menempatkan Indonesia hanya satu tingkat di bawah peringkat "*investment grade*". Dengan perubahan peringkat ini, Indonesia semakin berpeluang untuk menarik investasi dan arus modal dalam jumlah besar, serta dapat menarik dana-dana yang selama ini hanya bisa diinvestasikan ke dalam negara yang memiliki peringkat "*investment grade*". Dilihat dari perekonomiannya yang kuat, situasi politik yang stabil dan upaya reformasi yang berkelanjutan, maka Indonesia merupakan sebuah kekuatan besar yang sedang berkembang di Asia.

#### IV. SIMPULAN

Peranan penanaman modal asing terhadap pembangunan bagi negara sedang berkembang dapat diperinci menjadi lima, yaitu: Pertama, sumber dana eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan oleh negara sedang berkembang sebagai dasar untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti dengan perpindahan struktur produksi dan perdagangan. Ketiga, modal asing dapat berperan penting dalam memobilisasi dana maupun transformasi struktural. Keempat, kebutuhan akan modal asing menjadi menurun segera setelah perubahan struktural benar-benar terjadi meskipun modal asing di masa selanjutnya lebih produktif. Kelima, bagi negara-negara sedang berkembang yang tidak mampu memulai membangun industri-industri berat dan industri strategis, adanya modal asing akan sangat membantu untuk dapat mendirikan pabrik-pabrik baja, alat-alat mesin, pabrik elektronik, industri kimia dasar, dan sebagainya. Peranan PMA di Indonesia cukup mendukung juga perkembangan kehidupan ekonomi sesuai dengan konsep hukum dalam kegiatan ekonomi dan cita-cita hukum ekonomi Indonesia.

Untuk meningkatkan kontribusi hutang luar negeri, tabungan domestik serta investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Upaya penarikan investasi asing ke Indonesia perlu ditingkatkan. Faktor kemudahan dalam perizinan, dalam rangka meningkatkan investasi di Indonesia, maka faktor perizinan perlu diperhatikan, antara lain diupayakan untuk mempermudah pemberian pelayanan perizinan investasi dengan cara memperbanyak pusat pelayanan pemberian persetujuan atau perizinan investasi dengan melimpahkan wewenang dari Menteri Negara Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Gubernur Daerah. Di samping itu investasi asing mempunyai potensi untuk memberikan kontribusi yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi tidak hanya melalui transfer teknologi dan perbaikan pengetatan manajemen misalnya dengan pengembangan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, mendukung teknologi yang diterapkan, sehingga rencana alih teknologi dapat terlaksana dengan baik.
- b. Agar pengalokasian bantuan luar negeri optimal, maka perlu dipikirkan reorientasi proyek yang dibiayai dengan hutang luar negeri serta peran pengawasan baik oleh institusi yang berwenang melalui wakil-wakilnya perlu ditingkatkan.
- c. Untuk mengurangi ketergantungan negara terhadap sumber-sumber pembiayaan pembangunan dari luar negeri, maka perlu diupayakan mobilisasi dana dari dalam negeri sehingga diperlukan upaya intensifikasi tabungan domestik melalui:
  - Penggalakan pemungutan pajak (kekayaan dan barang mewah) yang bersifat progresif dan berdasar pada *ability to pay*.
  - Perlunya pendewasaan fungsi perbankan dan lembaga keuangan bukan bank agar mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arryman, A. 1999. "*Momentum untuk Keluar dari Perangkap Hutang Luar Negeri*", Dalam Roem.
- Arief, S. dan A. Sasono. 1987. "*Modal Asing, Beban Utang Luar Negeri dan Ekonomi Indonesia*", Lembaga Studi Pembangunan dan UI Press, Jakarta.
- Chenery, H. B. and A. M. Strout. 1966. "*Foreign Assistance and Economic Development*". American Economic Review, LVI(4).
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1999. *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia*, Cetakan Pertama, CV. Mandar Maju.
- Dowling, J. M. and Ulric Hipmenz. 1983. "*Aid, Saving and Growth in the Asian Region*" Development Economic, Vol.21, No. 1, Maret 1983.
- Djamin, Z. 1994. "*Pinjaman Luar Negeri serta Prosedur Alternatif dalam Pembiayaan Proyek Pembangunan Indonesia*", UI Press, Jakarta.
- Gujarati, Damodar. 1986. "*The External Debt Contribution to Output, Employment Productivity and Consumption; A model and A Application to Chile*". Economic Modelling, Januari 1986.
- Grinols, Earl and Jagdish Shagwati. "*Foreign Capital, Saving and Dependences*", The Review of Economic and Statistik, Vol.LXIII, No.4, November 1976.
- Hartono, Sri Redjeki. 2007. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Malang.
- Hill, H. 1990. "*Indonesia's Industrial Transformation, part I*", Buletin of Indonesia Economic Studies, 26 (2), PP. 79-120.
- Irawan dan M. Suparmoko. 1992. "*Ekonomi Pembangunan*", BPF, Yogyakarta.
- Jatmika, Sidik. 2001. *Otonomi Daerah, Perspektif Hubungan Internasional*. Biagraf Liberty, Yogyakarta.
- Kustianto, B. dan Istikomah. 1999. "*Peranan Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*". Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol.14, No. 2.

- Kuncoro, M. 1989, "*Dampak Arus Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tabungan Domestik*". Prisma, No. 9, Jakarta.
- , 1994. "*Dilema Utang Luar Negeri Indonesia*". Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol. 4, No. 1, Oktober 1994, Yogyakarta.
- Lee, J.S. and Y. Iwasaki. 1986. "*Effect of Foreign Capital Inflow an Developing Countries in Asia*", Economi Staff Popei, No.36 Chapter IV Asia Development Bank, April 1986.
- Rochbini, Didik J. 1995. "*Risiko Pembangunan yang Dibimbing Hutang*". PT. Gramedia, Jakarta.
- Sugiri, D. 2009. Pengaruh Hutang Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi (<http://danisugiri.wordpress.com/20/09/06/20/pengaruh-hutangpemerintah-terhadap-pertumbuhanekonomi>, diakses 16 Oktober 2011).
- Todoro, P. M. 1998. "*Ekonomi Pembangunan di Dunia Ketiga*", Bina Aksara, Jakarta.
- Papanek, G. F. 1973. "*Aid Foreign Private Invesment, Savings and Growth in Less Dovelopment Countries*". Jurnal of Political Economy, Vol.81, No.1, February 1973.
- Praduma, B. R. and J. Malcolm Dowling, Jr. 1990. "*Foreign Capital and Asian Economic Growth*". Asian Development Review. Vol.8, No.2, 1990.
- , 1988. "*The Impact of Foreign Capital and Growth : Evidences From Asian Developing Countries*". The Developing Economies, Vol. XXVI, No. 1, Maret 1988.
- Vermon, R. 1991. "*Managing in the International Economy*". Practice Hall New York.
- Weisskof, T. E. 1972. "*The Impact of Foreign Capital Inflow on Domestic Saving in Underdeveloped Countries*". Journal of International Economics, February, 1972.
- Zainulbasri, Y. 2000. "*Utang Luar Negeri, Investasi dan Tabungan Domestik: Sebuah Survey Literatur*", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol.15, No.3.

